

DAERAH – RETRIBUSI – DAN – DAERAH – PAJAK

2023

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 11 TAHUN 2023, LD 2023/NO.11 SETDA KAB. PURWOREJO 68 HLM

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Abstrak : - Amanat pembentukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di dalam satu Peraturan Daerah termaktub dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Amanat lain, dalam konteks pemerintahan Daerah juga termaktub dalam Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap hukum yang lebih tinggi, serta dalam rangka memberikan basis legitimasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Dalam Peraturan Daerah Ini Menetapkan Tentang Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Ketentuan Umum, Pajak, Retribusi, Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Atas Pokok Pajak/Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi, Sistem

Elektronik Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Sinergitas Pengelolaan Pajak Dan Retribusi, Pembinaan Dan Pengawasan, Sistem Informasi, Kemudahan Perpajakan Daerah, Ketentuan Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup .

- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024;
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian; Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 ; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 ; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 ; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 ; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
- Penjelasan 7 Hlm
- Lampiran 208 Hlm